

# Mempersiapkan Para Jurnalis Menyongsong Era Global

Deddy Mulyana

---

## ABSTRAK

*Desentralisasi pendidikan komunikasi mutlak diberlakukan di negara kita, karena staf akademik di perguruan tinggi yang bersangkutanlah yang secara persis mengetahui lapangan, bukan para birokrat yang duduk di belakang meja. Keterikatan kepada pemerintah pusat hanya akan menghambat pengembangan program pendidikan yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Jelas bahwa soal otonomi ini akan kian meningkatkan profesionalisme pengelolaan perguruan tinggi di samping kemandirian dapat dipertahankan.*

---

Prospek Perguruan tinggi swasta (PTS) tampaknya lebih cerah daripada perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia. Dengan asumsi bahwa baik PTS ataupun PTN memiliki sumberdaya (khususnya dana) yang seimbang, PTS akan lebih mampu mengembangkan dirinya, karena keluwesan yang dimilikinya. Dalam jangka panjang, PTS justru akan lebih berkualitas daripada PTN-nya, seperti juga PTS di Amerika (misalnya Harvard, Princeton, Stanford, Yale) yang umumnya lebih maju daripada "PTN" (*public universities*)-nya.

Salah satu alasan mengapa masa depan PTS lebih cerah daripada PTN-nya adalah bahwa lebih banyak kendala yang menghadang PTN dalam mengembangkan dirinya, antara lain: birokrasi yang berbelit-belit, kurangnya sistem meritokrasi (imbangan bagi yang berprestasi dan tidak berprestasi sama saja), dan sikap pejabat struktural PTN yang mirip pangrehpraja (komunikasi bersifat *top-down*, kurang demokratis). Pengalaman saya sebagai asesor dalam rangka akreditasi sejumlah perguruan tinggi di beberapa wilayah Indonesia menunjukkan bahwa beberapa program studi ilmu komunikasi di PTS mempunyai fasilitas pendidikan lebih baik daripada program studi ilmu komunikasi di PTN, misalnya mereka mempunyai sistem

informasi berbasis komputer dan laboratorium bahasa.

Bidang komunikasi adalah bidang yang takkan pernah kering, karena bidang tersebut berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, yakni kebutuhan akan informasi dan pengetahuan. Bahkan pada masa mendatang, bidang komunikasi akan berkembang lebih pesat lagi, sejalan dengan makin rumitnya kehidupan peradaban manusia dan makin lajunya perkembangan teknologi komunikasi. Namun bagaimanakah caranya agar kita dapat merebut pasaran kerja yang ada, terutama di lembaga dan perusahaan yang mapan dan kredibel, lebih khusus lagi dalam rangka memenuhi tantangan pasar bebas (AFTA, APEC, WTO) nanti?

Terdapat beberapa syarat mendasar yang harus dimiliki suatu universitas untuk mengembangkan dirinya secara optimal. Syarat-syarat ini perlu ditekankan lebih jauh lagi mengingat Indonesia sekarang ini harus menghadapi era global.

## Otonomi PT

Hanya bila perguruan tinggi, fakultas, jurusan atau program studi diberi otonomi yang luas kita dapat meningkatkan kualitas pendidikan kita dan

menghasilkan lulusan-lulusan yang unggul dalam masyarakat, yang punya integritas moral dan sekaligus dapat memenuhi kebutuhan pasar. Salah satu wujud otonomi yang luas itu adalah kebebasan PT untuk menyusun kurikulumnya sendiri dengan mempertimbangkan pasar di wilayah di mana PT tersebut berada. Berdasarkan otonomi ini setiap fakultas, jurusan, atau program studi (ilmu komunikasi) sebenarnya dapat mengembangkan kajian khas yang dibutuhkan propinsi di mana lembaga pendidikan tinggi itu berada. Misalnya, UI mungkin istimewa dengan periklanannya, sementara Unpad dengan jurnalistik radio dan TV-nya, Unhas boleh jadi terkenal karena komunikasi pembangunannya, sementara Unisba mungkin bangga dengan jurnalistik cetaknya.

Ilmu komunikasi tidak hanya terdiri dari jurnalistik, *Public Relations*, manajemen komunikasi (dulu: penerangan), dan perpustakaan, melainkan jauh lebih luas lagi. Setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan bidang-bidang lain yang lebih khusus lagi, misalnya: komunikasi lintasbudaya, komunikasi organisasi, komunikasi bisnis, komunikasi satelit (telekomunikasi), penelitian komunikasi, ekonomi media, teknologi komunikasi, perfilman, penulisan skenario, dsb., yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, dibutuhkan kreativitas untuk mengembangkan bidang-bidang tersebut. Itu berarti bahwa desentralisasi pendidikan komunikasi mutlak diberlakukan di negara kita, karena staf akademik di perguruan tinggi yang bersangkutanlah yang mengetahui lapangan, bukan para birokrat di pusat yang duduk di belakang meja.

Berdasarkan otonomi tersebut, untuk menyongsong era global, jurusan atau program studi ilmu jurnalistik dapat merancang seleksi khusus (tambahan) untuk merekrut mahasiswa, misalnya dengan melakukan wawancara bahasa Inggris, tes bahasa Inggris TOEFL atau IELTS, atau—ini yang lebih memungkinkan—mensyaratkan kemampuan bahasa Inggris tertentu, sebagai syarat kelulusan mereka (misalnya lulus wawancara bahasa Inggris, nilai TOEFL minimal 500). Untuk tujuan itu, dapat

dirancang mata kuliah bahasa Inggris lisan (*oral English* atau *conversation*), atau mensyaratkan nilai TOEFL tertentu, meskipun harus diambil di luar lembaga. Mahasiswa jurnalistik dapat juga disyaratkan untuk telah menulis sejumlah berita, feature, dan artikel (opini) yang dimuat dalam media unum sebagai syarat kelulusan mereka, atau setidaknya mengelola dan menerbitkan media intrakampus yang memuat hasil karya mereka.

Keterikatan kepada pemerintah pusat hanya akan menghambat pengembangan program pendidikan yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Untuk memperoleh izin membuka program pendidikan baru saja, diperlukan waktu berbulan-bulan, bahkan bisa satu-dua tahun, sementara para peminat bidang baru tersebut sangat besar dan bidang itu mempunyai prospek yang sangat baik. Jelas, seperti ditegaskan (mantan) Pembantu Rektor I ITB, Prof.Dr.Ir. Widiadnyana Merati, “Otonomi ini akan semakin meningkatkan profesionalisme pengelolaan PT di samping kemandirian dapat dipertahankan” (*Republika*, 15 Juni 1999).

### Kejelasan Visi dan Misi Program Studi

Program studi ilmu komunikasi atau ilmu jurnalistik harus mempunyai visi dan misi yang jelas—bukan sekadar penghias bibir (*lip service*)—yang dapat dijabarkan melalui komposisi dan keragaman mata kuliahnya serta penyediaan fasilitas (khususnya laboratorium) pendidikan yang relevan. Pertanyaan kuncinya adalah: Bagaimanakah profil lulusan yang hendak dihasilkan program S1 kita: sebagai praktisi, atau teoretisi? Apa yang membedakan lulusan program S1 dengan lulusan program S2 atau S3, atau bahkan dengan program D3? Jawabannya tidak pernah jelas. Jawaban atas pertanyaan di atas sangat mempengaruhi kurikulum yang kita tawarkan. Bila produk yang akan dihasilkan pendidikan S1 juga sebagai praktisi, selain sebagai teoretisi, tentu saja harus banyak mata kuliah yang bersifat praktis dan keterampilan yang ditawarkan. Bila melihat program S1 di Fikom Unpad, misalnya, dengan melihat komposisi mata kuliah yang ada dalam kurikulumnya (untuk Jurusan Jurnalistik

mata kuliah yang bersifat keterampilan tidak lebih dari 20 persen), dapat disimpulkan bahwa Fikom Unpad menghasilkan terutama teoretis (konseptor).

Sementara, pendidikan Diploma 3 lebih bersifat praktis, yang berbobot paling tidak 65 persen dari keseluruhan kurikulum, program S1 seyogianya menawarkan keahlian yang seimbang antara keahlian teoretis dan keahlian praktis. Idealnya, untuk saat ini setidaknya 30 persen dari keseluruhan kurikulum program S1 bersifat praktis (akan tetapi dalam jangka-panjang, rasio itu terus berubah dengan menambah mata kuliah praktis, hingga nantinya berbanding 50:50). Dalam pendidikan jurnalistik di *Columbia University*, New York, seperti disinggung Andreas Harsono (redaktur majalah *Pantau*) dalam semiloka yang diadakan Fikom Unisba 26 Februari 2002, perbandingan aspek praktis dan teoretis itu adalah 80:20. Itu mungkin terlalu jauh buat kita (kalaupun mau diterapkan, itu lebih cocok buat program D3). Akan tetapi memadailah kalau perbandingannya seperti saya sebutkan di atas. Itu berarti bahwa sekarang ini jumlah mata kuliah praktis di Fikom Unpad, dan juga di Fikom Unisba, harus ditambah lagi dan jumlah SKS (Satuan Kredit Semester) mata kuliah teoretis harus dikurangi agar beban SKS yang harus diambil dalam program S1 tetap.

Dalam rangka menghadapi era perdagangan bebas abad ke-21 secara berhasil, lulusan jurnalistik harus mampu juga berbahasa Inggris (berbicara dan membaca) dengan lancar dan menggunakan komputer dengan program yang relevan (misalnya *Word Processing*, *Excel*, *SPSS*, internet, dsb.). Ini berarti, kedua keterampilan itu harus diajarkan kepada mahasiswa secara memadai, tidak hanya dua hingga empat SKS seperti yang mungkin berlaku sekarang ini. Solusi yang dapat diambil adalah: lembaga juga bisa mensyaratkan penguasaan bahasa Inggris dan program komputer tertentu kepada mahasiswa yang dapat diperoleh di tempat lain. Penguasaan bahasa Inggris khususnya perlu mendapatkan perhatian serius. Kalau para siswa di Pesantren Gontor Jawa Timur saja dituntut untuk mampu berbicara bahasa Inggris dalam keseharian mereka, logikanya para mahasiswa jurnalistik harus

lebih mampu lagi dalam bidang itu, karena bahasa Inggris lebih relevan bagi mereka.

Kadang-kadang sulit juga membedakan program S1 dengan program S2. Menurut pengamatan, bahkan ada skripsi-skripsi mahasiswa S1 yang lebih baik dari tesis-tesis mahasiswa S2. Seharusnya, seperti dikemukakan Bambang Setiawan dalam seminar ISKI di Jakarta tahun 1997, program D3 hingga program S3 itu berjenjang dan ada keterkaitan antara program yang satu dengan program di atasnya dalam arti bahwa semakin tinggi tingkatannya, programnya semakin teoretis. Khusus untuk program S2, walaupun ada sifat praktisnya, bobotnya tidak lebih dari 20 persen, sementara program S3 murni bersifat teoretis/metodologis.

Agar terdapat keterpautan antara program S1 hingga program S3, seyogianya ketiga program itu ada di bawah fakultas atau jurusan yang sama. Bila terdapat mahasiswa S2 yang kurang berpengetahuan dalam mata kuliah tertentu, mereka dapat mengikuti kuliah tersebut yang ada dalam program S1.

### **Keluwesan Sistem SKS**

Dewasa ini, terlalu banyak jumlah SKS yang harus dipenuhi mahasiswa program S1 (145 SKS di Fikom Unpad dan di Fikom Unisba). Bandingkan dengan beban studi S1 di *Department of Communication Studies, Northern Illinois University* (Amerika Serikat) dan di Jabatan Komunikasi Universiti Kebangsaan (Malaysia) yang masing-masing menetapkan hanya 120 SKS. Jelas beban studi yang dikenakan kepada mahasiswa S1 kita terlalu banyak. Beban ini sebenarnya dapat dikurangi dengan menghapus semua mata kuliah yang tidak relevan, baik yang ditetapkan Departemen Pendidikan Nasional (kurikulum nasional) dan universitas, dan mengintegrasikan mata kuliah-mata kuliah yang tumpang tindih.

Di AS, mahasiswa program S1 disebut mahasiswa penuh bila mengambil 15 SKS per semester (bandingkan dengan di Indonesia yang bisa mengambil hingga 24 SKS). Meskipun demikian, menurut pengamatan, beban belajar

mahasiswa AS di luar ruang kuliah, meskipun tidak mengikat, kurang lebih adalah dua kali beban belajar di ruang kuliah, bila mahasiswa ingin berhasil dalam studi. Bila mahasiswa belajar 15 jam per minggu di kelas, maka mereka belajar 30 jam per minggu di rumah dan di perpustakaan. Tidak mengherankan bila mahasiswa AS jauh lebih sibuk belajar dan mengerjakan tugas dibandingkan dengan mahasiswa kita yang santai (padahal mereka mengambil 20 hingga 24 SKS).

Kurikulum yang sudah disusun harus dikaji ulang dan bila perlu direvisi, setidaknya lima tahun sekali, agar senantiasa mutakhir dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mata kuliah tertentu tidak harus selalu ada setiap semester ganjil atau semester genap (apa lagi bila dosennya sedang tugas belajar di luar propinsi atau di luar negeri). Boleh juga mata kuliah tertentu diajarkan, baik semester ganjil ataupun semester genap, atau bahkan diajarkan secara insidental (misalnya dua atau tiga tahun sekali), bergantung kepada relevansinya, misalnya tentang “bagaimana meliputi peristiwa pelanggaran HAM atau kerusuhan antaretnik atau antaragama.” Dewasa ini, mahasiswa yang belajar jurnalistik, seyogianya diberi pengetahuan sosial yang kuat, termasuk filsafat (ilmu), sosiologi, psikologi, antropologi, dan ilmu politik, ilmu ekonomi (meskipun semuanya sebagai pengantar) dan tentu yang terpenting adalah etika yang dapat menjadikan mereka punya integritas moral dan pribadi yang tangguh. Akan tetapi mata-mata kuliah yang kontemporer, seperti: jurnalistik sastra, jurnalistik internet (*media on line*), foto kreatif, teknik membaca berita *TV dan talkshow*, dan teknik periklanan modern, dapat ditambahkan sebagai mata kuliah tersendiri atau paling tidak menjadi bahasan dalam suatu mata kuliah.

Sistem SKS seyogianya memungkinkan mahasiswa yang karena suatu sebab berhenti kuliah di tengah jalan (di-DO atau pindah) untuk diterima di perguruan tinggi lain (dalam program studi yang sama atau mirip), tanpa harus mengulangi studinya dari awal di perguruan tinggi yang baru. Dengan kata lain, jumlah SKS yang sudah diambil dapat ditransfer, atau dikurangi sedikit, bila programnya sama, meskipun tentu saja

perguruan tinggi yang belakangan menetapkan persyaratan yang layak untuk menerima mahasiswa pindahan tersebut.

## Penulisan Skripsi sebagai Pilihan

Penyusunan skripsi sebaiknya bersifat pilihan, terutama hanya dianjurkan bagi mereka yang akan melanjutkan studi ke program S2 (diperkirakan akan tetap banyak peminatnya). Sebagai gantinya, mahasiswa membuat suatu proyek akhir, berupa makalah setebal 20-40 halaman, atau tugas lain (misalnya bagi mahasiswa jurnalistik, pembuatan laporan mendalam atas suatu kasus/peristiwa, misalnya tentang pembunuhan terhadap puluhan wanita yang dilakukan seorang dukun, atau membuat paket berita dengan video tentang suatu lembaga pendidikan yang sukses, atau merancang suatu iklan TV).

Program S1 di Indonesia sebenarnya setara dengan program Sarjana Muda (*Bachelor*) di Amerika Serikat atau di Australia. Di kedua negara itu, seperti juga di Malaysia, tidak ada keharusan menulis skripsi bagi mahasiswa. Bahkan mahasiswa S2 (*Master*) pun tidak wajib menulis tesis, tetapi beban menulis tesis itu diganti dengan mengikuti dua atau tiga mata kuliah (setara dengan 6 SKS).

Bila pengajaran semua mata kuliah dilaksanakan optimal (kehadiran dosen dan mahasiswa yang penuh, setiap makalah diperiksa dikomentari dan dikembalikan kepada mahasiswa, dan praktik yang memadai di laboratorium), penyusunan skripsi menjadi tidak begitu penting. Di negara kita banyak skripsi yang ditulis mahasiswa sebagai pengulangan topik-topik sebelumnya. Hanya objeknya yang berbeda, misalnya, dalam bidang jurnalistik rubrik surat kabar atau acara TV-nya, namun substansinya relatif sama. Padahal sebagian (besar) lulusan bidang ini nantinya akan bekerja sebagai praktisi, bukan sebagai peneliti. Kesan bahwa penulisan skripsi harus dipertahankan timbul karena tidak optimalnya pengajaran.

Bagi mahasiswa yang bermaksud terjun ke dunia kerja sesudah kuliah, latihan kerja (*job train-*

ing) yang memadai akan lebih berguna. Latihan kerja atau sistem magang sebaiknya ditambah dari satu hingga tiga bulan (praktik tiap hari) yang setara dengan dua atau tiga SKS hingga paling kurang enam bulan yang setara dengan paling sedikit enam SKS. Praktik kerja yang memadai akan memudahkan lulusan beradaptasi dengan lingkungan kerja.

## Keragaman Metode Penelitian

Fakultas harus memberikan kesempatan kepada mahasiswa seluas-luasnya untuk memilih metode penelitian yang sesuai dengan kemampuan dan minat mereka, untuk menyusun proyek akhir atau skripsi mereka. Dalam ilmu komunikasi, sebenarnya dikenal beberapa perspektif komunikasi. Fisher (1986) menyebutkan perspektif mekanistik, psikologis, interaksional, pragmatik, dan dramatisme. Tucker *et al.* (1981), menyebutkan perspektif hukum peliput (*covering-law perspective*), perspektif aturan (*rules perspective*), dan perspektif sistem. Littlejohn (1996) mengemukakan teori (perspektif) struktural dan fungsional, kognitif dan behavioral, interaksional, interpretif, dan teori kritis. Dalam konteks ini, seraya terus mempertahankan metode positivistik/kuantitatif (berlandaskan perspektif-perspektif: mekanistik, psikologis, hukum peliput, sistem/struktural fungsional, kognitif dan behavioral), maka metode penelitian kualitatif dalam ilmu komunikasi dan ilmu jurnalistik khususnya (berlandaskan perspektif-perspektif: interaksional, interaksional, interpretif, dan kritis) perlu pula diajarkan, termasuk apa yang disebut analisis wacana dan analisis *framing*. Pengayaan analisis masalah ini penting, mengingat perkembangan kehidupan manusia yang semakin cepat dan semakin rumitnya realitas yang harus diamati.

Jensen (1991:1-2) mengemukakan, pertumbuhan paradigma kualitatif setidaknya dipicu oleh dua kondisi historis. *Pertama*, kondisi internal dalam komunitas ilmiah: Banyak pakar dan lembaga yang mempertanyakan daya eksplanatori pendekatan empiris konvensional dalam ilmu-ilmu sosial. Terdapat banyak konsensus bahwa

banyak isu penelitian tidak cukup ditelaah melalui metode positivistik-kuantitatif. *Kedua*, kondisi eksternal di luar komunitas ilmiah: Perkembangan ilmu sedikit banyak berkaitan dengan perubahan dalam bidang sosioekonomi yang lebih luas, sehingga pendekatan kualitatif diperlukan untuk beradaptasi dengan bentuk realitas sosial yang baru, yang sering disebut masyarakat pascaindustri, era pascamodern, dan masyarakat informasi. Menurut Jensen, erosi pola-pola sosial tradisional dan perkembangan komunikasi massa sebagai sumber primer kohesi sosial di banyak kawasan dunia merupakan gejala abad ke-20 yang semakin cepat dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini menuntut pencarian akan teori-teori dan metode-metode baru yang lebih kontekstual untuk memahami kompleksitas sosial dan budaya serta perubahannya.

Mahasiswa-mahasiswa jurnalistik secara konvensional melakukan penelitian secara deskriptif mengenai tanggapan khalayak atas suatu rubrik di media massa cetak atau suatu acara di media massa elektronik. Atau walaupun mereka melakukan penelitian eksplanatori, mereka biasanya meneliti efek dari media massa. Padahal, teori-teori baru tentang media massa menunjukkan bahwa, jangankan acara hiburan atau iklan, bahkan berita saja tidak lagi dianggap netral atau objektif, melainkan suatu konstruksi yang bermuatan kepentingan pihak tertentu. Maka seorang mahasiswa misalnya dapat melakukan analisis *framing* mengenai "ideologi" dan keberpihakan yang subtil di balik berita-berita seputar demonstrasi mahasiswa atau buruh di Indonesia, atau kasus WTC (*World Trade Center*) yang terkenal itu.

## Penutup

Semua kriteria yang baru dibahas tentu saja bukanlah panacea untuk memajukan program ilmu komunikasi (jurnalistik) kita dalam rangka menyongsong era global. Pada akhirnya kunci keberhasilan itu ditentukan oleh manusianya sebagai sumberdaya utama, khususnya para dosennya. Para dosen seyogianya terus belajar, meskipun mereka telah mencapai gelar akademik

tertinggi. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan dosen dengan mengambil *sabbatical leave* selama enam bulan, satu kali setiap lima tahun misalnya. Dalam rangka itu, dosen yang bersangkutan dapat menggunakan periode tersebut untuk menulis buku (atau setidaknya diktat kuliah), atau lebih baik lagi bekerja dalam bidang industri (meskipun sebagai relawan) untuk kemudian mensosialisasikan pengalaman yang diperolehnya di universitas tempat ia bekerja. Di samping itu, tentu saja fasilitas yang dibutuhkan haruslah memadai juga, seperti ruang editing, ruang video, laboratorium foto, laboratorium radio, laboratorium TV, ruang komputer (termasuk sistem internet), dan sistem informasi (*database*) berbasis komputer. 

## Sumber Bacaan

- Fisher, B. Aubrey. 1986. *Teori-teori Komunikasi*. Penerj. Soejono Trimo. Bandung: Remaja Rosdakarya,
- Jensen, Klaus Bruhn. "Introduction: The Qualitative Turn." Dalam Klaus Bruhn Jensen dan Nicholas W. Jankowski, ed. *A Handbook of Qualitative Methodologies for Mass Communication Research*. London: Routledge, 1991, hlm. 1-11.
- Littlejohn, Stephen W. *Theories of Human Communication*. Edisi ke-5. Belmont: Wadsworth, 1996.
- Tucker, Raymond K., Richard L. Weaver II, dan Cynthia Berryman-Fink. 1981. *Research in Speech Communication*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall,